

LAMPIRAN X
 PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
 NOMOR 5 TAHUN 2022
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2023

SINKRONISASI MAJOR PROJECT DENGAN DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH

No	Provinsi	Prioritas Nasional (PN)	Major Project (MP)/ Proyek Prioritas Nasional/ Usulan	Usulan Gubernur (Rincian Output)	Indikasi K/L Pelaksana	Indikasi Rincian Output (RO) K/L	Target	Satuan	Kewenangan	Dukungan Daerah (APBD)	Kesiapan Proyek (Lahan/FS/DED dan lainnya)	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan (APBD 2023)
1	DKI Jakarta	05-Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	MP: Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan	1. Pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta North – South Phase 2 (Bundaran HI – Kota – Ancol Barat) 2. Pembangunan Stasiun KRL di Kawasan Jakarta Internasional Stadium (JIS)	Kementerian Perhubungan	176 - Pembangunan Sistem Angkutan Umum Massal (Prioritas Nasional)	12.3	km	Pemerintah Pusat	a. Pembangunan MRT Fase 2: 1. Rekening pendapatan dari pemerintah pusat dengan nama komponen hibah untuk pembangunan MRT sebesar Rp.4.684.621.270.908 (diteruskan sebagai Penyerahan Modal Daerah untuk PT MRT Jakarta) 2. Pengadaan Lahan untuk Pembangunan MRT Fase 2 sebesar Rp120.317.580.240 di Dinas Perhubungan 3. Penetapan KSD Nomor 30 (Pembangunan dan Pengoperasian MRT) Tahun 2022 b. Stasiun JIS: 1. Instruksi Gubernur Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Isu Prioritas Daerah Tahun 2021-2022 2. Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 88 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Isu Prioritas Daerah Tahun 2021-2022 3. Kepgub Nomor 1263 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Kepgub Nomor 1042 tahun 2018 tentang Daftar Kegiatan Strategis Daerah 4. Kajian Teknis Identifikasi Awal Kebutuhan Angkutan Umum Massal di Area JIS	1. Rekening pendapatan dari pemerintah pusat dengan nama komponen hibah 2. Lahan 3. Penetapan KSD Nomor 30 (Pembangunan dan Pengoperasian MRT) Tahun 2022	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	5.096.805.733.442
2	DKI Jakarta	05-Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	MP: Pemulihan Empat Daerah Aliran Sungai Kritis	1. Percepatan penyelesaian Bendungan Ciawi-Sukamahi dan Sudetan Ciliwung-KBT 2. Normalisasi Kali Ciliwung, Kali Sunter, Kali Pesanggrahan, Kali Angke, Kali Krukut, Kali Cipinang, Buaran, Jatikramat, Cakung (lanjutan)	Kementerian PUPR	125-Sudetan Ciliwung-KBT yang dibangun	1	Km	Pemerintah Pusat	1. Dukungan sosialisasi/proses pengadaan tanah sudetan Ciliwung/KBT yang dilaksanakan BWSCC 2. Pengadaan tanah sungai/kali Ciliwung, Pesanggrahan, Sunter telah teralokasi anggaran senilai 1.145T (2021) dan 811 M (2022) untuk sungai/kali/waduk dalam sistem pengendali banjir di Jakarta	1. Telah terdapat kesepakatan 6 Menteri/ Kepala Lembaga/Kepala Daerah. 2. Hasil Pembahasan Konsultasi Regional Kementerian PUPR Tahun 2022	Normalisasi/Restorasi Sungai	608.134.852.543
3	DKI Jakarta	05-Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	MP: Pemulihan Empat Daerah Aliran Sungai Kritis	1. Dukungan pembangunan/rehabilitasi sistem polder Marunda - Rorotan 2, dan Waduk Kamal 2. Pembangunan Waduk/Situ/Embung pada Waduk Brigif, Pondok Ranggong, Lebak Bulus, dan Embung	Kementerian PUPR	072-Pengendalian banjir Sungai Ciliwung yang dibangun	4.767,30	Ha	Pemerintah Pusat	Pembangunan/RevitalisasiSitu/Danau/ Embung/Waduk secara Multiyears senilai 40 M (2021) dan 233 M (2022) guna mengurangi debit puncak sungai/kali	1. Telah terdapat kesepakatan 6 Menteri/ Kepala Lembaga/Kepala Daerah. 2. Hasil Pembahasan Konsultasi Regional Kementerian PUPR Tahun 2022	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	632.650.767.963
4	DKI Jakarta	05-Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	MP: Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa	Pembangunan dan peningkatan tanggul laut, breakwater, dan bangunan pengamanan pantai lainnya di Kawasan Pesisir Utara	Kementerian PUPR	005 - Pengamanan Pantai di Jakarta yang dibangun	33	km	Pemerintah Pusat	Sedang dalam tahap penyelesaian kegiatan tanggul NCICD di Kamal Muara dan Kali Blencong, pembangunan akan dilanjutkan di Muara Angke, Pantai Mutiara, Sunda kelapa, dan Tanjung Priok. Tanggul Pengaman Pantai sepanjang 280 m di tahun 2021 dari total 22.46 km hingga tahun 2030. Setelah dilakukan peninjauan lokasi, perlu dilakukan perencanaan kembali dan reviu desain untuk lokasi Muara Angke, Pantai Mutiara, Sunda Kelapa, Tanjung Priok, dan Kali Blencong (hulu) karena kondisinya bersinggungan dengan infrastruktur, pemukiman, pelabuhan, jalan raya, dll.	1. Sedang dalam tahap penyelesaian kegiatan tanggul NCICD di Kamal Muara dan Kali Blencong, pembangunan akan dilanjutkan di Muara Angke, Pantai Mutiara, Sunda kelapa, dan Tanjung Priok. Tanggul Pengaman Pantai sepanjang 280 m di tahun 2021 dari total 22.46 km hingga tahun 2030. 2. Setelah dilakukan peninjauan lokasi, perlu dilakukan perencanaan kembali dan reviu desain untuk lokasi Muara Angke, Pantai Mutiara, Sunda Kelapa, Tanjung Priok, dan Kali Blencong (hulu) karena kondisinya bersinggungan dengan infrastruktur, pemukiman, pelabuhan, jalan raya, dll.	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	154.999.999.977

No	Provinsi	Prioritas Nasional (PN)	Major Project (MP)/ Proyek Prioritas Nasional/ Usulan	Usulan Gubernur (Rincian Output)	Indikasi K/L Pelaksana	Indikasi Rincian Output (RO) K/L	Target	Satuan	Kewenangan	Dukungan Daerah (APBD)	Kesiapan Proyek (Lahan/FS/DED dan lainnya)	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan (APBD 2023)
5	DKI Jakarta	05-Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	MP: Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa	Pembangunan dan peningkatan tanggul laut, breakwater, dan bangunan pengamanan pantai lainnya di Kawasan Pesisir Utara	Kementerian PUPR	005 - Pengamanan Pantai di Jakarta yang dibangun	33	km	Pemerintah Pusat	Sedang dalam tahap penyelesaian kegiatan tanggul NCICD di Kamal Muara dan Kali Blencong, pembangunan akan dilanjutkan di Muara Angke, Pantai Mutiara, Sunda kelapa, dan Tanjung Priok. Tanggul Pengaman Pantai sepanjang 280 m di tahun 2021 dari total 22.46 km hingga tahun 2030. Setelah dilakukan peninjauan lokasi, perlu dilakukan perencanaan kembali dan reviu desain untuk lokasi Muara Angke, Pantai Mutiara, Sunda Kelapa, Tanjung Priok, dan Kali Blencong (hulu) karena kondisinya bersinggungan dengan infrastruktur, pemukiman, pelabuhan, jalan raya, dll.		Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	25.767.732.649
6	DKI Jakarta	05-Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	MP: Rumah Susun Perkotaan (1 Juta)	1. Pembangunan Rumah Susun Sewa/Milik Sederhana untuk MBR (Rusun Muara Angke) 2. Pembangunan Rumah Susun Cipinang Besar Selatan melalui Skema Konsolidasi Tanah	Kementerian PUPR	004 - Rumah Susun Hunian MBR/Pekerja	1440	Unit	Pemerintah Pusat	1. Dilaksanakan Multi Years dengan biaya sebesar Rp 720 M (Rp 713.836.515.895) (Rusun Muara Angke) 2. Dokumen Community Action Plan (CAP) Cipinang Besar Selatan (Cibesel)	1. Telah disusun Proposal Pembangunan Rusun Muara Angke 2. Telah disusun Panduan Rancang Kota Kawasan Pembangunan Terpadu Muara Angke 3. Lahan tercatat sebagai aset DKPKP (UPT Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan (UPPP) Muara Angke)	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	60.767.749.369
7	DKI Jakarta	05 - Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	33 - Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)	Pembangunan SPAM Jatiluhur I dan Serpong-Karian lingkup Hilir DKI Jakarta	Kementerian PUPR	002 - Pembangunan SPAM Regional	7200	lps	Pemerintah Pusat	1. Telah disepakatinya nota kesepakatan bersama antara Gubernur DKI Jakarta dengan Menteri PUPR dan Menteri Dalam Negeri tentang sinergi dan dukungan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum di Provinsi DKI Jakarta 2. Perencanaan SPAM Jatiluhur I dan Serpong Karian oleh PAM Jaya	1. Pengerjaan SPAM Jatiluhur di hulu dibiayai melalui KPBU dan di hilir melalui APBD, namun karena terdapat pemotongan akibat pandemi sehingga tidak dapat dipenuhi. Kebutuhan investasi di hilir mencapai ±14 Triliun. 2. Telah diterbitkan Surat oleh Gubernur ke Menteri PUPR terkait usulan pengintegrasian proses pengerjaan hulu dan hilir.	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	9.499.841.182
8	DKI Jakarta	05 - Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	33 - Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)	Pembangunan Jakarta Sewerage System Pengolahan Limbah Jakarta Zona 2 dan 5	Kementerian PUPR	003 - Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	668.000	m3/hari	Pemerintah Pusat	1. Kajian DED oleh PAL Jaya dan FS JSS Zona 5 oleh KIAT 2. Penyiapan rencana resettlement Zona 2 dan 5	Telah dilaksanakannya DED untuk JSS Zona 2 oleh PAL Jaya dan DED JSS Zona 5 dari PAL Jaya serta FSnya oleh KIAT. Penyiapan rencana resettlement Zona 2 dan 5	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	110.967.637.968
9	DKI Jakarta	05 - Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	33 - Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)	Pembangunan Jakarta Sewerage System Pengolahan Limbah Jakarta Zona 2 dan 5	Kementerian PUPR	003 - Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	668.000	m3/hari	Pemerintah Pusat	1. Kajian DED oleh PAL Jaya dan FS JSS Zona 5 oleh KIAT 2. Penyiapan rencana resettlement Zona 2 dan 5		Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	1.999.989.320

